

SKRIPSI
MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH DAERAH MELALUI BRIGADE
SIAGA 115 DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI KABUPATEN
JENEPONTO



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

**MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH DAERAH MELALUI BRIGADE
SIAGA 115 DALAM MENANGANI COVID-19 DI KABUPATEN
JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh :

Nur Wahyuda Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103017

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Manajemen Krisis Pemerintah Daerah
Melalui Brigade Siaga 115 dalam Menangani
Covid 19 di Kabupaten Jenepono

Nama Mahasiswa : Nur Wahyuda Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Pembimbing II

Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ilhyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
NBM 984 810

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0364/FSP/A.4-II/I/46/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang telah dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Februari tahun 2025.



1. Rudi Hardi, Sos., M.Si
2. Nursaleh Hartaman, S.IP., M.Si
3. Muhammad Randhy A, S.IP, M.Si

()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Wahyuda Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menangani Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto” adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 01 Februari 2025

Yang Menyatakan



Nur Wahyuda Hidayat

ABSTRAK

Nur Wahyuda Hidayat (2025), *Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menangani Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto.*

(dibimbing oleh Rudi Hardi S.Sos., M.Si dan Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP)

Menularnya Covid-19 di Indonesia membuat Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani covid 19 adalah membentuk tim gerak cepat mobile yaitu Brigade Siaga 115 yang bertujuan membantu ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses sarana kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Wawancara, Pengamatan/Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Brigade Siaga 115 dalam menangani covid 19 di kabupaten jeneponto sesuai dengan tugasnya dalam menangani kegawatdaruratan. Pemerintah daerah membuat regulasi baru dan satuan gugus tugas Tim Gerak Cepat khusus dalam penanganan covid 19. Tim Gerak Cepat melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi covid yaitu melakukan penjagaan pemeriksaan kesehatan di perbatasan kabupaten jeneponto, mengambil/merujuk pasien covid ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, melakukan edukasi protokol kesehatan 3M dan membagikan berita akurat tentang covid melalui media-media yang berkerja sama. Risiko TGC dalam melaksanakan tugasnya yaitu tertular covid 19 sehingga pemerintah menyediakan alat pelindung diri dan menyediakan suplemen daya tahan tubuh kepada petugas. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya yaitu masyarakat kurang menerima edukasi tentang covid, abai melaksanakan protokol kesehatan dan tingginya kepercayaan kepada berita hoax yang beredar. Faktor pendukung dalam melaksanakan tugasnya yaitu mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan dukungan dari teman media dalam menyebarkan berita yang relevan.

Kata kunci : Manajemen Krisis, Brigade Siaga 115, Covid-19

ABSTRACT

NUR WAHYUDA HIDAYAT *Crisis Management Of Local Government Through Brigade Siaga 115 In Facing Covid-19 In Jeneponto District* (Suoervised by Rudy Hardi and Nursaleh Hartaman)

The transmission of Covid-19 in Indonesia has forced the Government of the Republic of Indonesia to release health protocols. One of the efforts made by the government in dealing with covid 19 is to form a mobile fast-motion team, namely Brigade Siaga 115, which aims to help the helplessness of the community in accessing health facilities. The data collection techniques used are Interview Techniques, Observation / Observation and Documentation. The results of the study are the 115th Standby Brigade in handling Covid 19 in Jeneponto Regency in accordance with its duties in handling emergencies. The local government made new regulations and a "Tim Gerak Cepat" task force unit in handling covid 19. TGC has made various efforts to deal with the covid pandemic, namely guarding health checks at the border of Jeneponto district, taking / referring covid patients to the nearest health care facility, educating 3M health protocols and sharing accurate news about covid through cooperating media. The risk of TGC in carrying out its duties is being infected with covid 19 so that the government provides personal protective equipment and also provides immune supplements to officers. The inhibiting factors in carrying out their duties are lack of public education about COVID, neglect of implementing health protocols, and high trust in false news circulating. Supporting factors in carrying out their duties are getting budget support from the central government and support from media friends in spreading relevant news.

Keywords : Crisis Management, Brigade Siaga 115, Covid-19

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata terindah yang patut diucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada Hamba-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti atas perjuangan yang panjang dan jawaban atas doa yang senantiasa mengalir dari orang-orang terdekat. Dan tak lupa pula penulis panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan besar umat Islam sekaligus pemimpin bagi keseluruhan umat manusia yakni Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa yang penuh kesuraman menuju masa yang penuh harapan seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini dengan judul “Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menangani Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto” disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini berjalan tidak mudah. Ada banyak rintangan, hambatan, dan cobaan dalam prosesnya. Namun berkat ketekunan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun berupa bantuan materil sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat

mendalam dan teriistemw kepada kedua orang tua tercinta yakni Alm. M. Sukri Gassing dan Ibunda Hj. Saripa yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi kesuksesan putra-putrinya, juga yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. Dan juga penulis menyampaikan terima kasih kepada istri tercinta yakni Nursakinah Ahmad yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Rudi Hardi S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Rudi Hardi S.Sos., M.Si dan Bapak Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen beserta jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Kabid P2P dan sub kosrdinator surveilans dan imuniassi
7. Nur Rahmat Reski bersama Istri dan Nurul Khaidah Nanang selaku saudara penulis yang tak pernah bosan mengirimkan doa serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis

8. Semua rekan-rekan seperjuangan, khususnya rekan-rekan di kelas IP 17A yang telah memberikan banyak pelajaran berharga dan pengalaman hidup kepada penulis.

Teriring doa semoga Allah SWT yang menjadikan semua pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. *Amiin*. Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan guna menambah khasanah ilmu pengetahuann.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh..

Makassar, 01 Februari 2025

Penulis

Nur Wahyuda Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Peneliltian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori.....	14
1. Manajemen Krisis	14
2. Pelayanan Publik.....	20
3. Inovasi Brigade	24
C. Kerangka Fikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian	33
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknis Analisis Data	36
G. Pengabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38

B. Hasil	39
C. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru, 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut '2019 novel coronavirus' atau '2019-nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO, 2020). Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020..

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam segala hal di sektor pemerintahan. Akibat terbatasnya ruang gerak karena mengikuti protokol kesehatan, masyarakat tetap diberikan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh pelayanan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, namun penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin terus bertambah. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap bahaya Covid-19 yang mengakibatkan kurangnya

kesadaran masyarakat sehingga penanganan (pencegahan bagi yang tidak terinfeksi dan/atau pengobatan terhadap yang terkena wabah) kurang terlaksana dengan baik dalam sistem pemerintahan, dari daerah pusat hingga bagian daerah paling bawah, yaitu desa (Azami et al., 2021).

Robert P. Powell tahun 2005 (Jalaluddin, 2020) yang menyatakan bahwa krisis adalah kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan (*chaos*) dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Krisis merupakan isu yang dihadapi perusahaan dimana isu itu telah mencapai tahap kritisi (Broom, 2009).

Manajemen krisis menurut Iriantara (2004), adalah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal organisasi. Manajemen krisis didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis (*crisis bargainin gandnegotiation*), membuat keputusan disaat krisis (*crisisdecision making*), dan memantau perkembangan krisis (*crisisdynamics*). Menurut Coombs (dalam Kriyantono 2015) yaitu serangkaian faktor yang dirancang untuk memerangi krisis dan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Berusaha untuk mencegah atau mengurangi hasilnegatif dari krisis dan dengan demikian melindungi organisasi, stakeholder, dan atau industri dari kerusakan.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori daerah bermasalah kesehatan di Indonesia (hasil Riset Kesehatan Dasar 2013) dengan IPKM 0,3506 yang terendah di Sulawesi Selatan. Pelayanan kesehatan di Jeneponto merupakan pelayanan publik yang dinilai buruk pelayanannya, ditambah lagi rendahnya akses dan kualitas

pelayanan kesehatan menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Ketidakberdayaan masyarakat untuk menolong diri sendiri dan keluarga dalam bidang kesehatan merupakan masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintah kabupaten Jeneponto.

Salah satu cara yang dilaksanakan untuk mengurangi ketidak berdayaan masyarakat dalam mengakses sarana kesehatan adalah dengan membentuk tim gerak cepat secara mobile di setiap UPTD puskesmas yang selanjutnya diberi nama Brigade Siaga 115. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Kesehatan.

Brigade Siaga 115 merupakan program inovasi sektor layanan kesehatan kabupaten Jeneponto dalam upaya meningkatkan dan mendekatkan akses layanan Kesehatan kepada masyarakat. Salah satu dasar terbentuknya inovasi ini adalah sulitnya masyarakat -yang mengalami masalah kesehatan- mengakses fasilitas Kesehatan dikarenakan domisili yang jauh di pelosok desa, di ketinggian bukit-bukit, atau pun di pesisir pantai.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan guna mengkaji **“Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kbpupaten Jeneponto ?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 dalam menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto
 - b. Memberikan masukan terhadap Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan input bagi pengambilan keputusan dalam manajemen krisis pemerintah daerah melalui Brigade Siaga 115 dalam menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto
 - b. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat mengenai manajemen krisis pemerintah daerah melalui

Brigade Siaga 115 dalam menghadapi Covid-19 Di Kabupaten
Jeneponto.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh bahan pembandingan dan referensi, serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang serupa. maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

No	Nama Penulis	Judul Skripsi/Jurnal	Hasil Penelitian
1.	(Vebrianti et al., 2021)	Manajemen Krisis Study From Home Dan Kebijakan Di Masa New Normal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen krisis dari kebijakan SfH yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi merupakan respon krisis secara situasional dan kondisional. Kekuatan dari kebijakan ini bahwa belajar bisa dimana saja dan kapan saja, melalui pembelajaran daring. Sedangkan kelemahannya terdapat ketidakmerataan penggunaan teknologi seperti kendala sinyal, penyampaian materi satu arah, dan orang tua secara kemampuan dan materi dalam mendidik anak di rumah belum siap. Pemerintah Kota Cimahi juga mempersiapkan strategi pembelajaran di era new normal dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan
2.	(Ulfa et al., 2019)	Manajemen Krisis Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Pada Saat Gempa Bumi Lombok 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara hanya merespons krisis sesuai dengan situasi dan kondisi dikarenakan tidak memiliki perencanaan komunikasi krisis sebelumnya. Tim krisis berupa pos komando dibentuk untuk memudahkan pengorganisasian. Dalam pelaksanaannya, Humas lebih banyak melakukan aktivitas pengelolaan informasi dan media yang digunakan. Proses pengendalian dilakukan dengan cara analisis informasi publik sebagai bahan masukan dan evaluasi. Setelah krisis, Humas merumuskan

			perencanaan jangka panjang untuk membangun citra pemerintah Lombok Utara sebagai kabupaten tangguh bencana.
3.	(Indasari & Anggriani, 2020)	Krisis Komunikasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberitaan Penyebaran Covid-19 Melalui Udara)	krisis yang terjadi di WHO dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap WHO sebagai sumber informasi kesehatan dunia yang terpercaya, terbukti WHO salah. Berdasarkan pemahaman komunikasi krisis, krisis perbedaan informasi yang disampaikan WHO mengenai penyebaran virus corona melalui udara merupakan krisis informasi yang terjadi karena human error, dimana WHO dianggap lalai dalam mengkaji informasi apapun sebelumnya. diajukan ke publik.
4.	(Nahar, Lesmana, 2020)	Komunikasi Pemerintah Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19	Hanya beberapa hari setelah pembentukan kelompok kerja pada 18 Maret 2020 Percepatan Penanganan Covid-19 menerbitkan portal www.Covid19.go.id sebagai sumber resmi informasi cara penanganan virus Covid-19. Website ini juga dilengkapi dengan program hoax buster yang dapat digunakan sebagai website referensi untuk menentukan apakah informasi tentang Covid19 adalah berita nyata atau hoax. Materi pembelajaran meliputi berbagai materi pendidikan umum. Peluncuran website Covid19.go.id diikuti dengan pembukaan akun di platform Twitter, Facebook, dan Instagram media sosial milik kelompok kerja Covid. Serta akun media sosial instansi terkait seperti Departemen Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan akun media sosial presiden indonesia juga turut menjadi media informasi. Situs web dan media sosial selalu diperbarui dengan berita update perkembangan dan berita tentang keputusan yang diambil dalam penanganan Covid-19, termasuk kampanye sosial terkait penanganan Covid-19

5.	(Mahriya, Mokhammad Naigam, 2020)	Corporate communication PT. XL Axiata Tbk. merespon masa krisis pandemi virus Covid-19	Masa krisis ini dapat ditangani dengan baik kalau PR dalam hal ini Corporate Communication mampu membuat pemetaan atas apa yang diperbincangkan masyarakat terkait isu yang ditangani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XL Axiata melewati beberapa tahapan penanganan krisis, tahapan tersebut antara lain: Tahap pembentukan tim, tahap analisis, tahap perencanaan dan tahap implementasi. Pada tahap pembentukan tim, PT. XL Axiata Tbk. sudah menyiapkan langkah-langkah dan sudah memiliki team krisis atau disebutnya Emergency Response Team (ERT). Pada tahap analisis, Corporate Communication XL Axiata membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi atas situasi yang terjadi. ERT kemudian mengidentifikasi kemampuan sumber daya internal dan eksternal, lalu menganalisa segala kemungkinan dan pengaruh yang potensial terjadi. Pada tahap perencanaan, PT. XL Axiata Tbk. melakukan tahap perencanaan yaitu komitmen perusahaan, bahwa jika terjadi krisis, perusahaan akan menjaga transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan, tidak boleh ada hidden agenda kepada internal dan eksternal, mengadakan internal sharing informasi secara berkala dan memberikan informasi yang menenangkan stakeholders. Dan pada tahap implementasi, PT. XL Axiata Tbk. melaksanakan program yang bersifat sosial. Antara lain berupa meluncurkan program gratis akses data 2GB/hari untuk mengakses aplikasi-aplikasi penunjang kerja dan belajar dari rumah, website kesehatan pemerintah, e-Learning, saluran daring universitas untuk membantu pelanggan tetap produktif.
----	-----------------------------------	--	--

6.	(Putri, Meri Safarwati, 2021)	Manajemen krisis PT. Kereta Api Indonesia dalam menangani keluhan pelanggan di masa pandemi Covid 19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas PT KAI Daop 1 Jakarta melibatkan semua divisi/bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan proaktif. Humas PT KAI tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu berkoordinasi bersama dengan sejumlah divisi lainnya untuk mengatasi krisis. Humas PT. KAI dalam hal ini bertugas untuk menyampaikan, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman dan membentuk opini publik tentang kondisi yang sedang terjadi agar citra baik perusahaan tetap terjaga. Diawali dengan melakukan analisa terhadap keluhan para pelanggan, mengumpulkan data dari berbagai divisi untuk mengidentifikasi pelanggan yang terdampak krisis secara langsung dan tidak langsung, membuat perencanaan serta program strategi komunikasi dan strategi aksi. Untuk pelanggan yang terdampak langsung akan disms oleh customer service yang menangani keluhan pelanggan dilapangan atau customer service akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan tersebut. Sedangkan bagi pelanggan yang tidak terdampak langsung diinformasikan melalui broadcast release. Untuk pelanggan yang berada distasiun diinformasikan menggunakan media announcement dari announcer, untuk pelanggan diluar stasiun (masyarakat luas) Humas PT. Kereta Api Indonesia melakukan konferensi pers secara virtual, penyebaran release dan membuat advertorial.
----	-------------------------------	--	--

7.	(Permata & Mulyana, 2021)	Manajemen Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19	Krisis	Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Manajemen Krisis PT. Aia Financial KCU Ahmad Yani di Masa Pandemi Covid menemukan temuan bahwa Dalam krisis yang terjadi di PT. Aia Financial KCU Ahmad Yani bahwa PT. Aia Financial KCU Ahmad Yani mengalami 4 tahapan krisis mulai dari Tahap Prodromal, Tahap Akut, Tahap Kronis dan Tahap Evaluasi. Pada tahap prodormal, perusahaan belum bisa memahami tentang krisis yang akan terjadi. Pada tahap akut, perusahaan mengalami kerugian berupa berkurangnya intesitas komunikasi baik dengan nasabah dan karyawan lainnya, karena perusahaan asuransi merupakan perusahaan bisnis yang bisa berjalan dengan baik jika target mereka dalam penjualan bisa terus tercapai. Pada tahap kronik, perusahaan mulai mengalami pengurangan nasabah dan pada tahap resolusi, perusahaan mulai memperbaiki citra dengan mengadakan klarifikasi melalui media online dan juga mempebaiki produk perusahaan. Krisis yang bersifat baru muncul ini mengakibatkan adanya penurunan jumlah nasabah dikarenakan perusahaan yang kurang sigap dalam menghadapi krisis yang akan terjadi. Krisis yang terjadi dimulai dari ABM yang kurang sigap dalam menangkap sinyal krisis, adanya pandemic Covid- 19 dan adanya Work From Home yang diterapkan diperusahaan sehingga perusahaan mengalami penurunan premi. Dalam krisis yang terjadi tidak adanya Public Relations yang turun langsung melainkan ABM atau bisa disebut dengan kepala team yang langsung mengontrol krisis yang terjadi dilapangan.
----	---------------------------	---	--------	---

Berikut adalah Perbedaan dari keenam penelitian terdahulu diatas :

1. **Seni Vebrianti, Dasrun Hidayat (2021)** Pada penelitian ini menjelaskan tentang manajemen Krisis dalam studi *From Home* yang di laksanakan berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan

hasil penelitian yang di peroleh yaitu dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan dan kekurangan yaitu melalui kebijakan ini belajar bisa dimana saja dan kapan saja, melalui pembelajaran daring. Sedangkan kelemahannya terdapat ketidakmerataan penggunaan teknologi seperti kendala sinyal, penyampaian materi satu arah, dan orang tua secara kemampuan dan materi dalam mendidik anak di rumah belum siap.

2. **Nadya U, Wayan S, Hartin N K (2019):** Pada penelitian ini menjelaskan tentang manajemen krisis yang dilakukan oleh humas pemerintah daerah kabupaten lombok dalam bencana alam yang terjadi di Lombok yaitu gempa bumi dengan hasil penelitian humas pemerintah Kabupaten Lombok merespon krisis sesuai situasi dan kondisi.
3. **Fera Indasari, Ida Anggriani (2020):** Pada penelitian ini menjelaskan tentang Krisis komunikasi yang terjadi di masa pandemic Covid-19 dengan menggunakan teori SSCT (*Situational Crisis Communication Theory*) dari Choombs, 2007 dengan hasil penelitian terdapat perbedaan informasi yang diberikan oleh WHO dalam penyebaran Covid-19 melalui udara.
4. **Nahar, Lesmana, (2020):** Pada penelitian ini menjelaskan pemerintah dan gugus tugas Covid 19 telah menggunakan semua saluran media tradisional dan media online termasuk media sosial serta menggunakan peran influencer untuk memberikan informasi tentang perkembangan penanganan krisis, kampanye sosial, himbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai penanganan krisis secara berkala dan konsisten. Hal ini bisa mengurangi

sedikit ketakutan dan kepanikan masyarakat menghadapi krisis yang terjadi. Ditambah lagi dengan aktifnya akun media sosial Presiden Jokowi yang selalu memperbaharui informasi dan berisi himbauan-himbauan beliau kepada rakyat Indonesia adalah suatu hal yang berarti bagi rakyat yang sedang dalam keadaan stress dan bingung.

5. **Mahriva, Mokhammad Naigam, (2020):** Pada penelitian ini menjelaskan dengan kondisi ini PT. XL Axiata Tbk. dalam merespon krisis ini membuat tahapan berupa: Pertama, Tahap pembentukan tim, Tim ini sudah ada sebelum Pandemi ini muncul, bahkan Emergency Response Team (ERT) ini sudah dipersiapkan dan dilatih untuk menghadapi segala krisis. ERT ini yang bekerja untuk membuat analisis baik secara mikro dan makro dengan strategi untuk menghadapinya. Kedua, Tahap Analisis, ERT ini membuat apps utk internal karyawan, latihan kerja WFH, monitoring karyawan dan internal komunikasi sampe membuat buku panduan internal disebut buku putih. Ketiga, Tahap Perencanaan, langkah antisipasi untuk menghadapi pandemi perusahaan juga sudah menjalankan Business Continuity Plan. Keempat, Tahap Implementasi, implementasi bisnis dari rencana kerja perseroan juga mesti diubah dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti alokasi investasi untuk memenuhi kebutuhan trafik pengguna yang meningkat, termasuk menambah coverage dan kapasitas bandwidth.

6. **Putri, Meri Safarwati, (2021):** Manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta melibatkan semua divisi/bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut

untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan proaktif. Humas PT Kereta Api Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu berkoordinasi bersama dengan sejumlah divisi lainnya untuk mengatasi krisis. Diawali dengan melakukan analisa terhadap keluhan para pelanggan, mengumpulkan data dari berbagai divisi untuk mengidentifikasi pelanggan yang terkena dampak krisis, membuat perencanaan serta program strategi komunikasi dan strategi aksi. Lalu menetapkan strategi atau pola komunikasi yang dilakukan dengan kompak, berdasarkan kesepakatan bersama dan satu suara isi pesannya. Selanjutnya, melakukan strategi aksi dengan cepat, proaktif dan tanggap untuk mengatasi krisis yang terjadi. Membuat tahapan penyelesaian manajemen krisis berdasarkan standart office procedure (SOP) krisis.

7. **Permata & Mulyana, (2021):** Pada penelitian ini menjelaskan upaya penanggulangan krisis yang dilakukan PT. Aia Financial KCU Ahmad Yani, dengan adanya identifikasi krisis dimana krisis terjadi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, lalu krisis yang terjadi membuat progress dari para staff menurun yang mengakibatkan adanya penurunan premi terjadi. ABM belum memahami adanya krisis namun saat krisis terjadi ABM terus melakukan jaringan komunikasi antara internal maupun eksternal. Untuk strategi pemulihan PT. Aia Financial KCU Ahmad Yani menggunakan strategi adaptif yaitu dengan merubah beberapa kebijakan, memodifikasi operasional, berkompromi dan berusaha mengambil kepercayaan public, dengan itu PT. Aia Financial juga memunculkan program baru dikhususkan untuk kondisi saat ini yang membuat PT. Aia Financial KCU Ahmad Yani dapat bangkit kembali. Peran ABM dalam

pelaksanaan Manajemen Krisis yang terjadi di PT. Aia Financial KCU Ahmad Yani ini sangat penting, karena dalam krisis ini ABM langsung yang mengambil peran untuk mengontrol manajemen krisis.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan lakukan oleh peneliti dimana perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengenai Bagaimana Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto

B. Kajian Teori

1. Manajemen Krisis

a. Pengertian Manajemen Krisis

Krisis merupakan suatu masalah atau tantangan yang pasti pernah dialami oleh setiap perusahaan/instansi, khususnya dimasa pandemi Covid 19 ini. Tak ada satupun perusahaan yang luput dari krisis karena memang tidak ada satupun perusahaan yang siap menghadapi pandemi, yang membedakan hanyalah pada seberapa besar krisis yang dialami dan keberhasilan perusahaan dalam melewati krisis tersebut. Pengelolaan sebuah krisis merupakan faktor paling penting yang menjadi penentu terbentuknya opini masyarakat akan citra suatu perusahaan. Krisis menciptakan perusahaan dalam posisi menjadi perhatian masyarakat sehingga mempertanyakan pengelolaan manajemen krisis pada perusahaan tersebut.

Penanggulangan krisis tergantung pada kemauan yang serius

untuk mengatasi kecepatan bertindak yang tepat, kesiapan aparat untuk tenaga bantuan, kejujuran dan keterbukaan, serta kerjasama dengan semua pihak. Krisis bisa juga sebagai “*turning point of history life*”, yaitu suatu titik balik dalam kehidupan yang dampaknya memberikan pengaruh signifikan, ke arah negatif maupun positif, tergantung pada reaksi yang diperlihatkan.

Krisis tidak selalu bersifat negatif tetapi juga dapat berkembang ke arah yang positif. Oleh karena itu yang harus dikelola adalah faktor resiko dan faktor ketidak pastiannya agar kelangsungan perusahaan dapat diperkirakan. Salah satu karakter krisis adalah adanya kejutan. Tekanan yang kuat saat penyelesaian krisis adalah bagian dari manajemen krisis. Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki *crisis management plans* yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi.

Manajemen krisis selalu ditekankan pentingnya identifikasi permasalahan dan langkah untuk melakukan isolasi. Namun mengetahui itu saja tidak cukup. Memang benar bahwa krisis telah dapat teridentifikasi dan diisolasi, krisis akan lebih mudah diatasi. Tetapi untuk mengatasi krisis yang datang tiba-tiba, perusahaan membutuhkan waktu untuk menelusuri proses mulai dari identifikasi sampai pengendaliannya. Langkah yang disarankan adalah agar perusahaan memiliki guidance atau pegangan bila sewaktu-waktu krisis muncul. Ada tiga *generic strategy* yang disarankan, yakni strategi (*defensive*), strategi adaptasi (*adaptive*) dan strategi dinamis (*dynamic*). Dengan pegangan ini, seorang praktisi public relations

akan dengan mudah melakukan langkah-langkah implementasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu jika terjadi kondisi krisis, perusahaan dapat mendefinisikan dan merespon dengan baik. Melalui persiapan yang matang, pemimpin dapat memerintahkan bagaimana dan apa yang sebaiknya dilakukan saat krisis terjadi.

Mengantisipasi krisis dapat dilakukan dengan menggunakan perencanaan strategik dan manajemen resiko. Setiap krisis harus dihadapi serius oleh pimpinan dan disampaikan kepada publik secara jujur. Manajemen krisis menjadi penting bagi keefektifan organisasi karena semua organisasi dipengaruhi oleh beragam publik dan saling berhubungan dengan organisasi lain. Dalam hal ini *Public Relations* tidak dapat dijalankan tanpa aktivitas yang sesuai. Tidak ada upaya komunikasi tanpa memperdulikan isi pesan dari media maupun publik yang persuasif, yang dapat menyelamatkan organisasi jika performa kerjanya kurang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, pada kasus ini ketika Pelindo dianggap tidak dapat mengevakuasi kapal yang tenggelam dalam waktu singkat dan cepat maka dampak yang diterima perusahaan adalah penilaian negatif karena ketidaksiapan perusahaan menanggapi situasi atau dampak yang terjadi akibat kecelakaan kapal di area pelabuhan tersebut. Apabila Pelindo tidak dengan cepat menanggapi maka publik akan mempertanyakan performa kerjanya dalam menangani krisis (Fika, 2011).

Menurut Nova (2011), langkah-langkah penanganan krisis adalah sebagai berikut:

- 1) Peramalan krisis (*forecasting*). Manajemen krisis bertujuan untuk menekan faktor-faktor resiko dan factor ketidakpastian seminimal mungkin. Setiap perusahaan menghadapi masa depan yang selalu berubah dan arah perubahannya tidak bisa diduga (*uncertainly condition*). Untuk itu peramalan terhadap krisis (*forecasting*) perlu dilakukan pada situasi pra-krisis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang terjadi didunia bisnis. Untuk memudahkannya, manajemen dapat melakukan peramalan (*forecasting*) dengan memetakan krisis pada peta barometer krisis.
- 2) mengidentifikasi dan menganalisis peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang terjadi didunia bisnis. Untuk memudahkannya, manajemen dapat melakukan peramalan (*forecasting*) dengan memetakan krisis pada peta barometer krisis.
- 3) Pencegahan krisis (*prevention*). Langkah-langkah pencegahan sebaiknya diterapkan pada situasi pra-krisis. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis. Namun, jika krisis tidak dapat dicegah, manajemen harus mengupayakan agar krisis tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Untuk itu, begitu terlihat tanda-tanda krisis, segera arahkan ketahap penyelesaian.
- 4) Intervensi krisis (*intervantion*). Langkah intervensi dalam situasi krisis bertujuan untuk mengakhiri krisis. Pengendalian

terhadap kerusakan (*damage control*) dilakukan pada tahap akut. Langkah-langkah pengendalian terhadap kerusakan diawali dengan identifikasi, isolasi (pengucilan), membatasi (*limitation*), menekan (*reduction*), dan diakhiri dengan pemulihan (*recovery*) (Jalaluddin, 2020).

b. Strategi Manajemen Krisis

Manajemen krisis merupakan proses perencanaan strategis terhadap krisis atau titik balik negatif, sebuah proses yang mengubah beberapa resiko dan ketidakpastian dari keadaan negatif dan berusaha agar organisasi dapat mengendalikan sendiri aktivitasnya (Fearn – Banks, dalam Prayudi, 1998: 2) Manajemen krisis yang efektif tidak hanya meredakan atau mengakhiri krisis tapi juga ada kalanya dapat memberikan organisasi reputasi yang lebih positif dari sebelum terjadi krisis.

Krisis dalam kaca mata public relations tidak selalu diidentikkan dengan ancaman. Krisis, apakah itu disebabkan oleh faktor internal (konflik karyawan, konflik manajemen, kegagalan produk) ataupun faktor eksternal (tuntutan konsumen, perubahan kebijakan pemerintah ataupun konflik elit politis) seringkali dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk membangun citra secara lebih cepat. Tentu saja, itu sepenuhnya tergantung pada bagaimana krisis tersebut dikelola. Dan juga, bagaimana krisis bisa diprediksi sejak awal.

Ada tujuh strategi yang harus diperhatikan dalam perencanaan manajemen krisis menurut Prayudi antara lain:

- 1) Adanya mekanisme untuk menentukan krisis potensial yang

ada dalam perusahaan. Peran manajemen adalah dalam meninjau Kembali bidang- bidang kegiatan yang mudah menimbulkan krisis. Dalam hal ini perlu dirancang suatu sistem peringatan dini berupa system pelaporan *top- down dan bottom-up*.

- 2) Pengidentifikasian khalayak yang terpengaruh. Siapa saja yang terkenadampak langsung maupun tidak langsung oleh krisis.
- 3) Prosedur yang diikuti selama krisis. Biasanya berisi daftar yang harus dikerjakan, rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti pembentukan pusat pengendalian krisis, tim manajemen krisis, dan prosedur komunikasi.
- 4) Rencana kontingensi untuk melanjutkan aktivitas selama krisis. Berisi berbagai kemungkinan tentang fasilitas alternatif, pelayanan kepada pasar atau konsumen, atau kemungkinan menarik produk.
- 5) Pengangkatan dan pelatihan tim manajemen krisis. Pembentukan tim manajemen krisis menggunakan pertimbangan fungsional perusahaan, seperti public relations, hukum, atau produksi.
- 6) Rencana komunikasi krisis. Meliputi siapa saja yang akan ditunjuk menjadi juru bicara dan mengontrol informasi yang harus dikeluarkan agar tidak membingungkan khalayak sasaran, pemilihan media, dan penentuan pesan yang akan dikomunikasikan.

- 7) Evaluasi terhadap krisis. Strategi manajemen yang baik setidaknya harus memperhatikan komponen-komponen diatas (Fika, 2011).

2. Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Andry, 2020), mengemukakan bahwa Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis, karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Aparatur pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum atau *public service* dan para pegawai negeri dikenal dengan istilah *Abdi masyarakat* atau *public servants*. Bahkan sesungguhnya fungsi pengaturan yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah merupakan bagian dari pelayanan umum juga (Andry, 2020).

b. Klasifikasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum, berikut penjelasannya :

- 1) Pelayanan kebutuhan dasar, Pelayanan kebutuhan dasar yang

harus diberikan pemerintah meliputi kesehatan pendidikan dasar dan bahankebutuhan pokok masyarakat.

- 2) Pelayanan umum Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok yaitu (a) pelayanan administratif; (b) pelayanan barang; dan (c) pelayanan jasa.

c. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) Buku III dalam Hardiyansyah adalah:

- 1) Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yangterkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.
- 2) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai warga Negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan,jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya.
- 3) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyedian listrik, air, telepon, dan transportasilokal.

- 4) Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah.
- 5) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

d. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- 1) Sistem, prosedur dan metode yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- 2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- 3) Sarana dan prasarana, dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
- 4) Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan public

masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

e. Asas-asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dilakukan pihak lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan, dengan kata lain dalam memberikan pelayanan publik inspirasi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut:

- 1) Transparansi : bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- 2) Akuntabilitas: dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 4) Partisipatif: mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak: tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban: pemberi dan penerima

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Andry, 2020).

3. Inovasi Brigade

a. Pengertian Brigade Siaga 115

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto No. 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Brigade Siaga 115 Pada UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto menjadi Landasan Brigade Siaga 115. Brigade Siaga 115 adalah satu satuan tugas kesehatan yang terdiri dari petugas medis, paramedic dan awam yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pencegahan, penyiagaan maupun pertolongan bagi masyarakat yang mengalami gangguan Kesehatan. Brigade Siaga 115 memberikan respon cepat dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan dengan cara memberikan layanan akses untuk menghubungi nomor telepon puskesmas terdekat. Pelayanan ini tersebar di 19 titik di 11 kecamatan, hal ini tentunya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam waktu yang cepat dan singkat. Selain itu pelayanan Brigade Siaga 115 diberikan gratis kepada masyarakat.

Puskesmas keliling memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang sulit menjangkau puskesmas baik yang sehat maupun yang sakit, layanan ini telah dilakukan sejak dulu. Kegiatan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dengan jadwal yang telah ditetapkan puskesmas. Namun karena puskesmas keliling hanya dilaksanakan sekali sebulan, maka mobil ambulance disiagakan selama 24 jam untuk dapat melayani masyarakat dalam wilayah kerja

puskesmas yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan. Selain itu, terdapat pula layanan kunjungan rumah oleh perawat dan bidan. Kegiatan ini yang kemudian dimodifikasi menjadi kegiatan Terpadu Tim Brigade Siaga 115.

b. Tujuan Brigade Siaga 115

Ada pun yang menjadi tujuan dari Brigade Siaga 115 dalam menghadapi Covid-19 pada Kabupaten Jeneponto meliputi :

- 1) Tujuan Umum: Meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pemerintahan yang baik menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan.
- 2) Tujuan Khusus:
 - a) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Ketersediaan tim gerak cepat Brigade Siaga 115 di masing-masing UPTD puskesmas di wilayah Kabupaten Jeneponto lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan kepada masyarakat.
 - b) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pelayanan kesehatan yang diberikan dengan lebih cepat dan tepat waktu akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Orang-orang yang sehat menyebabkan masyarakat menjadi sehat sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Menjadikan Jeneponto sebagai Daerah Bermartabat

Kesehatan Peningkatan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jeneponto, sehingga dengan masyarakat yang sehat dan sejahtera akan membawa Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang bermartabat dalam bidang kesehatan.

c. Jenis Layanan

Brigade siaga 115 merupakan pelayanan publik secara mobile dengan menggunakan kendaraan ambulance masing masing puskesmas dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. Jenis Layanan Brigade Siaga 115 adalah pelayanan yang bersifat kegawatdaruratan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat dan tidak diperuntukkan mengangkut jenazah.

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan pada masyarakat antara lain: berbagai jenis penyakit yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat, korban luka akibat kecelakaan di jalan raya atau akibat kerusuhan di masyarakat, korban akibat bencana alam atau gangguan alam lainnya dan menjadi fasilitas rujukan bagi persalinan abnormal.

d. Dampak Dan Manfaat

Layanan Brigade Siaga 115 memberikan respon cepat dan penanggulangan masalah kesehatan berupa pencegahan, penyiagaan maupun pertolongan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan sehingga masyarakat dapat cepat dan mudah memperoleh pertolongan sesuai dengan masalah kesehatannya. Layanan kesehatan diberikan pada semua kelompok masyarakat

tanpa membedakan status sosial dan golongan umur. Layanan diberikan terutama kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan ketidak mampuan secara fisik untuk menjangkau fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun mempunyai keterbatasan secara akses maupun finansial dapat segera menghubungi nomor telepon/call center fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan petugas Kesehatan akan segera melakukan kunjungan rumah ke masyarakat tersebut. Sebelum layanan Brigade Siaga 115 tersedia, masyarakat dengan kasus kegawatdaruratan harus berusaha sendiri mencapai tempat pelayanan sehingga pertolongan seringkali terlambat diberikan. Apalagi bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang kadang harus mengeluarkan biaya besar untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan publik di bidang kesehatan, maka layanan Brigade Siaga 115 telah memberikan dampak yang signifikan yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak kesulitan lagi mencari pertolongan terutama yang bersifat kegawatdaruratan selain itu juga tersedia sarana transportasi berupa ambulance jika terjadi kasus yang perlu dirujuk baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit.

Ketersediaan tim gerak cepat Brigade Siaga 115 di masing-masing UPTD puskesmas lebih mendekatkan pelayanan kesehatan

dan pelayanan rujukan kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan khususnya kasus kegawatdaruratan dapat segera dilakukantindakan penyelamatan.

Dengan layanan Brigade Siaga 115, masyarakat tidak perlu lagi khawatir terlambat memperoleh pelayanan kesehatan, terutama masyarakat yang berada pada daerah sulit akses kendaraan roda empat, karena Tim Brigade Siaga 115 siap 24 jam menerima panggilan layanan kesehatan.

e. Replikasi Dan Keberlanjutan

Brigade Siaga 115 melakukan layanan kunjungan dan perawatan di rumah bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera, rujukan pasien dari rumah ke puskesmas terdekat dan selanjutnya rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit (jika diperlukan). Seiring berjalannya waktu keberadaan Brigade Siaga 115 telah banyak dibutuhkan oleh sektor lain pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan antisipasi pertolongan pertama layanan kesehatan, antara lain kegiatan berupa jalan santai, sepeda santai, motor trail, pertandingan sepak bola dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sektor -sektor lain yang membutuhkan layanan ini antara lain Kepolisian Resort Jeneponto, Kodim 1425 Jeneponto dan Dinas Pendidikan KabupatenJeneponto.

Dalam operasionalnya, Brigade Siaga 115 didukung oleh tenaga dokter, perawat dan bidan serta pengemudi yang bertugas di masing masing UPTD Puskesmas. Para staf yang terlibat di Tim

Brigade Siaga 115 telah diberikan pelatihan tanggap darurat untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Pelatihan yang telah diikuti yaitu pelatihan ATCLS (Advanced Cardio Life Support) bagi tenaga Dokter, BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) bagi perawat/bidan dan pelatihan MFR (Medical First Responder) dan Rescue bagi tenaga pengemudi Brigade Siaga 115. Pembiayaan kegiatan selama hampir 5 tahun bersumber dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui DAU-OPD Dinas Kesehatan.

Masyarakat yang membutuhkan layanan Brigade Siaga 115 dapat meminta pertolongan melalui call center yang ada di masing-masing Puskesmas. Tim Brigade Siaga 115 yang bertugas segera meregistrasi laporan tersebut dan menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh penelpon. Tim paramedis akan melakukan triase - skrining/pemilihan cepat- terhadap pasien untuk selanjutnya menentukan apakah si pasien hanya perlu dirawat di rumah, dirawat di Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit. Dengan tersedianya layanan publik Brigade Siaga 115, masyarakat tidak kesulitan lagi dalam menghubungi fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan masalah kesehatannya, tanpa perlu mengeluarkan biaya atas layanan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan Brigade Siaga 115, berbagai pihak memiliki peran penting dan ikut terlibat dalam menunjang tercapainya tujuan kegiatan ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto selaku Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan inovasi ini tidak akan

dapat berbuat banyak tanpadukungan dari berbagai sektor.

Dalam proses perencanaan kegiatan ini, beberapa sektor terkaitantara lain Bagian Hukum yang berperan dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang Brigade Siaga 115, Bappeda selaku OPD yang memverifikasi perencanaan kegiatan Brigade Siaga 115, DPRD selaku badan legislatif yang mengesahkan rencana kegiatan Brigade Siaga 115. Dalam proses pelaksanaan, sektor yang terkait antara lain PPKAD (Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah) untuk pencairan dana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, Kepala Puskesmas, Tim Medis dan driver Ambulance sebagai pelaksana kegiatan di masyarakat, Polres Jeneponto, Kodim 1425 Jeneponto, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaransebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan Brigade Siaga 115 serta seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto yang membutuhkan layanan Kesehatan secara cepat dan sekaligus mengevaluasi kegiatan Brigade Siaga 115.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan kegiatan untuk mencari jawaban dari masalah penelitian yang dirumuskan secara teoritis yang masih perlu diuji kebenarannya di lapangan. Sumber-sumber penyusunan kerangka pemikiran tersebut adalah dari berbagai teori atau konsep yang dituangkan dalam tinjauan pustaka.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka peneliti memberikan gambaran sesuai judul dan teori yang telah dibahas untuk menentukan bagaimana Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan teori dari Nova (2011). Dengan demikian, pada penelitian ini alur pikir peneliti dapat dilihat pada gambar kerangka pikir sebagai berikut:



D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peramalan krisis (*forcasting*) yaitu bagaimana menekan faktor resiko dan faktor ketidak pastina dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto
2. Pencegahan krisis (*prevention*). yaitu langkah-langkahpencegahan yang di lakukan pemerintah dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto
3. Intervensi krisis (*intervantion*). yaitu langkah pengendalian pemerintah dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto.
4. Faktor penghambat dan factor pendukung dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan .Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jeneponto tepatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk melihat fenomena. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran lengkap dan klarifikasi secara jelas mengenai suatu masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Manajemen Krisis Pemerintah Daerah

Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli yaitu dari lembaga terkait dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti yaitu Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber- sumber lain seperti dokumen atau catatan berupa laporan dari lembaga terkait.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian adalah subyek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto
2. Tenaga Kesehatan
3. Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sample yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah terkait dengan Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh keakuratan informasi dari informan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah langkah dengan prosedur tahapan tahapan berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan lngkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul betul dibutuhkan ssebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan peengelompokaan dan diberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data penliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

G. Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono dalam (Sinatriyo & dkk, 2019).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (Data Primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Jeneponto terletak antara 5°23'12" – 5°42'1,2" Lintang Selatan dan 119°29'12" – 119°56'44,9" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang meliputi 11 kecamatan.

Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut, dan pada bagian Selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa sungai (hidrologi) yang sebagian telah dibendung yaitu Kelara, Tino, Poko Bulu yang telah berfungsi untuk mengairi sebagian lahan persawahan. Daerah bagian Selatan memiliki perairan Laut (Flores) dengan panjang pantai berkisar 114 Km.

Pemerintah Daerah Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Ditinjau dari status desa/kelurahan yang tertinggal, masih banyak dijumpai Desa/kelurahan yang tertinggal yaitu sebanyak 50 Desa/Kelurahan, Sisanya yang lain yaitu sebanyak 63 Desa/Kelurahan tidak tertinggal lagi.

Pada tahun 2014 tanah negara seluas 317,00 Ha telah disertifikatkan. Sedangkan untuk pendaftaran hak pencacatan tanah di Jeneponto, menurun drastis sebanyak 262 buah. Diantaranya pengakuan hak 67, pemberian hak 85, hak guna bangunan 3, hak pakai 5, pemisahan 93, dan sertifikat pengganti 9.

Topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian Utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut, dan pada bagian Selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter atas permukaan laut. Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.

B. Hasil

1. Peramalan krisis (*forecasting*)

Peramalan krisis yaitu bagaimana menekan faktor risiko dan faktor ketidak pastian dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto. Tanpa menekan faktor risiko dan faktor ketidakpastian dapat membuat manajemen yang krisis, pemerintah berisiko mengalami kerugian besar dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Terkait dalam menekan faktor risiko dan faktor ketidakpastian Manajemen Krisis Pemerintah Daerah diperjelas dengan pernyataan Kepala Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam hasil wawancaranya yaitu:

“Brigade Siaga 115 itu terbentuk di kepemimpinan Bapak Bupati Ishak Iskandar memalui SK Kepala Dinas Kesehatan. Brigade 115 dibentuk dalam hal kegiatan kegawatdaruratan di segala level kabupaten. Diawal sebelum ada pandemi covid-19. Pandemi covid masuk di Jeneponto itu tahun 2020 bulan April. Yang kita libatkan dalam Covid-19 ini kita membuat Tim Gerak Cepat berdasarkan SK Kepala Dinas. Pada waktu itu kita melibatkan semua lintas sektor TNI POLRI. Disamping itu kita melibatkan tim surveilans dari puskesmas. Jadi dari awal covid-19 itu lebih banyak didominasi dari TGC. Setiap ada kasus di Kecamatan itu kami dari kabupaten turun langsung. Di tahun 2021 itu kita sudah delegasikan ke Puskesmas jadi setiap ada kegiatan manajemen krisis itu dilaksanakan langsung TGC puskesmas saat menemukan kasus baru” (Wawancara dengan Informan Suryaningrat, M, SKM., M.H pada Senin, 02 Januari 2023) .

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto membuat Brigade Siaga 115 sebelum pandemi Covid-19 kemudian setelah pandemi Pemerintah Daerah membuat Tim Gerak Cepat (TGC) khusus penanganan covid-19. Hal ini kemudian didukung oleh pernyataan Sub. Kordinator Surveilans dan Imunisasi dalam wawancaranya yaitu :

“Pemerintah dalam hal ini membuat semacam regulasi dan membuat satgas dalam penanganan covid 19. Jadi tugas satgas disini bagaimana bisa menekan terjadinya penularan secara luas mengenai covid 19 ini. Untuk manajemen krisis ada brigade siaga 115 ketika terjadi kasus di suatu tempat maka brigade 115 ini yang langsung bergerak untuk menangani kasus ini apakah dia mengambil dan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau rumah sakit. Kalaupun bukan di pelayanan kesehatan terdekat dapat mengantarkan ke lokasi khusus isolasi covid 19” (Wawancara dengan Informan Mappibaung, S.Kep pada Rabu, 22 Februari 2023)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Brigade Siaga

115 masih melaksanakan kewajibannya dalam kegawatdaruratan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto walaupun pemerintah membuat regulasi yang baru. Penangan covid-19 yang dilakukan pemerintah dirasakan juga oleh masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan pernyataan Seorang Warga dalam wawancaranya yaitu

“pernah ada kasus covid-19 di dekat sini, cepat sekali petugas puskesmas datang untuk tes swab semua orang satu rumahnya, supaya tidak ada beng yang tertular lagi. Pakai baju hasmat mi itu juga datang, na kasi takut-takut ki warga yang lain” (Wawancara dengan Informan Daeng Paneng pada Kamis, 23 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan warga diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dalam menekan faktor resiko dan ketidak pastian manajemen krisis Pemerintah Daerah melalui Brigade Siaga 115 dalam menangani Covid-19 ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan memakai jasa brigade siaga 115 secepat mungkin dan membuat Tim Gerak Cepat Khusus Covid -19 agar pandemi ini tidak menyebar luas.

2. Pencegahan krisis (*prevention*).

Pencegahan krisis yaitu langka-langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto. Pencegahan krisis ini langkah paling efisien yang dilakukan sebelum krisis itu terjadi. Dalam pencegahan krisis manajemen krisis Pemerintah Daerah melelaui Brigade Siaga 115 dalam menghadapi covid 19 mengambil langkah sesuai dengan pernyataan Sub. Kordinator

Surveilans dan Imunisasi dalam wawancaranya yaitu :

“Risiko yang dihadapi dalam manajemen krisis pemerintah daerah mengenai covid-19 ini yaitu penularan terhadap tim, jadi dalam hal ini pemerintah harus memastikan safety dari TGC dan Brigade siaga 115 ini. Siapa yang akan menangani jika Tim ini tertular, sehingga harus benar-benar safety. Jadi untuk memastikan keselamatan dan keamanan tim ini kami mempersiapkan alat pelindung diri dan bagaimana menciptakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan” (Wawancara dengan Informan Mappibaung, S.Kep pada Rabu, 22 Februari 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa resiko yang terjadi dalam manajemen krisis ini yaitu penularan covid-19 ke Petugas Brigade Siaga 115 dan Satgas. Penyebaran covid memiliki angka penularan yang cepat dan menjadi hal yang harus diperhatikan, apalagi bagi petugas kesehatan yang menangani pandemi covid 19. Pemerintah dalam menangani risiko ini mengambil tindakan dengan menyiapkan Alat Pelindung Diri untuk petugas, dan pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam waancaranya yaitu

“untuk mencegah manajemen krisis pandemi covid ini karena yang sangat berperan dalam pandemi ini petugas Tim Gerak Cepat sehingga pemerintah menjamin keselamatan Tim Gerak Cepat. Tim ini diusahakan untuk tidak terkena covid dengan cara kita siapkan alat pelindung diri yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung rambut. Kita sediakan ruangan untuk sterilisasi agar sekiranya pulang kerumah dalam keadaan tidak membawa virus untuk keluarga melainkan membawa vitamin yang kami sediakan juga” (Wawancara dengan Informan Suryaningrat, M, SKM., M.H pada Senin, 02 Januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas pemerintah benar-benar memaksimalkan segala upaya untuk menjaga kesehatan petugas kesehatan dan Tim Satgas. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah mulai dari mempersiapkan alat pelindung diri yang akan digunakan, menyediakan ruangan desinfeksi untuk membersihkan/mensterilkan tubuh setelah bertugas sebelum pulang ke rumah masing-masing serta pemerintah daerah menyediakan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh untuk petugas tim gerak cepat. Pernyataan pemerintah ini sesuai dengan pernyataan salah satu petugas dalam wawancaranya yaitu :

“selama covid ini pemerintah sangat perhatian ke kami tim tenaga kesehatan, mungkin karena kami garda terdepan jadi kesehatan kami juga jadi hal yang sangat penting bagi pemerintah. Setiap hari jika ada kasus yang akan di tangani pemerintah membagikan 1 set APD selama melaksanakan tugas sekitar 7 jam. Sudah dinas pemda bagikan lagi vitamin sama susu. Jadi na perhatikan ki memang ini pemerintah” (Wawancara dengan Informan Suryadiatma S.Kep., Ns pada Senin, 02 Januari 2023)

Dari pendapat di atas dapat dilihat pemerintah benar-benar melakukan pencegahan risiko ketenaga kesehatan dan tim satgas covid 19 agar tidak tertular dengan covid 19.

3. Intervensi krisis (*intervantion*).

Intervensi krisis yaitu langkah pengendalian pemerintah dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto. Pemerintah kabupaten Jeneponto dalam intervensi krisis memberikan beberapa upaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit dalam hasil wawancaranya yaitu :

“Kita membentuk satuan tugas covid, satgas itu melibatkan beberapa stakeholder terkait diantaranya Dinas Kesehatan, BPBD, Kesbangpol, Satpol PP, TNI dan Polri. Langkah yang kami lakukan pada saat penanganan covid yaitu satgas melakukan penjagaan di setiap perbatasan pintu masuk Kab. Jeneponto waktu subuh dengan melibatkan TNI POLRI dengan melakukan pemeriksaan swab secara random, dan bekerja sama dengan petugas Promkes untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang 3M (Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak)” (Wawancara dengan Informan Suryaningrat, M, SKM, M.H pada Senin, 02 Januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dalam menangani manajemen krisis ini membentuk satgas covid yang melibatkan stakeholder lain yaitu Dinas Kesehatan, BPBD, Kesbangpol, Satpol PP, TNI dan Polri. Upaya yang dilakukan oleh satgas ini yaitu salah satunya melakukan penjagaan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk perbatasan Kabupaten Jeneponto. Penjagaan ini untuk pemeriksaan kesehatan seperti cek suhu tubuh dan pemeriksaan swab ke masyarakat yang keluar atau masuk melalui pintu perbatasan Kabupaten Jeneponto. Satgas covid juga bekerja sama dengan Petugas Promkes untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak) sebagai pencegahan penyebaran covid 19.

Pemerintah dalam menangani manajemen krisis untuk yang telah terkena covid ini melakukan beberapa upaya. Hal ini sesuai dengan Pernyataan dari Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi dalam wawancaranya yaitu :

“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk pengendalian manajemen krisis ini yaitu kita edukasi untuk melakukan isolasi mandiri dirumah jika terkena kasus covid-19 dan menghentikan segala kegiatan diluar rumah. Kemudian untuk melalui pemerintah provinsi menyediakan yaitu hotel wisata covid yang beberapa kali raturan pasien yang sudah kita kirim” (Wawancara dengan Informan Mappibaung, S.Kep pada Rabu, 22 Februari 2023)

Dari hasil wawancara diatas pemerintah daerah melakukan upaya edukasi kepada masyarakat segala kalangan untuk melakukan isolasi mandiri bagi yang terkena covid 19 tanpa keluhan kesehatan, masyarakat di arahkan untuk menghentikan segala kegiatan diluar rumah guna untuk meminimalisir penyebaran covid 19. Selain itu pemerintah provinsi juga menyediakan hotel wisata covid di kota Makassar dan kabupaten Bantaeng bagi pasien yang terkena covid-19 yang memiliki keluhan dan ingin memisahkan diri dari keluarga dirumah agar penularan dapat dihentikan.

Masyarakat merespon positif terkait upaya pemerintah dalam menangani manajemen krisis di kabupaten Jeneponto, hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warga dalam wawancaranya yaitu :

“banyak sekali kerjaannya pemerintah selama covid ini, bahkan orang yang tidak pernah di swab, pergi na swab kalau lewatki di posko penjagaannya. Sempat juga ketat sekali pemeriksaan diperbatasan. Kita masyarakat mengikut saja ke pemerintah, apalagi untuk kesehatan ji” (Wawancara dengan Informan Rahmat Resky pada Kamis, 23 Februari 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan upaya pemerintah dalam menangani covid ini, masyarakat

juga menerima secara positif dengan langkah-langkah pemerintah daerah dalam menangani covid 19 di kabupaten Jeneponto.

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung

Faktor penghambat dan faktor pendukung merupakan suatu hal yang menjadi penentu dalam suatu kegiatan. Dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto ada beberapa faktor penghambat dan pendukung yang berpengaruh. Hal ini dijelaskan sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam wawancaranya yaitu :

“Faktor penghambatnya yaitu ketidakpercayaan masyarakat , abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan dan susah nya mengedukasi masyarakat tentang covid 19 ini. Sedangkan untuk faktor pendukung yaitu kita didukung oleh pemerintah daerah dalam hal dengan alokasi anggaran. Kita diberikan melalui kegiatan btt kemudian di tahun 2020 itu anggaran di refocusing dimana semua anggaran dipangkas untuk dialokasikan ke covid, untuk tahun 2022 anggaran kegiatan vaksinasi diutamakan yang lebih dominan ke insentif petugas imunisasi yang kemasyarakat” (Wawancara dengan Informan Suryaningrat, M, SKM., M.H pada Senin, 02 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor penghambat dari manajemen krisis ini terletak di masyarakat yang kurang untuk menerima informasi seputar covid-19 karena hal ini juga pemerintah daerah mengalami kesusahan dalam mengedukasi tentang

covid 19 ke masyarakat. Serta abainya masyarakat tentang protokol kesehatan juga menjadi faktor penghambat yang pemerintah alami, protokol kesehatan sebagai kunci dalam mengurangi penyebarluasan covid ini masih diabaikan oleh sebagian masyarakat yang kurang percaya kepada pemerintah daerah.

Sedangkan untuk faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah pusat dengan memberikan anggaran yang dialokasikan dalam menangani covid 19 di kabupaten Jeneponto. Kontribusi anggaran yang diberikan pemerintah pusat berasal dari anggaran kegiatan BTT, Refocusing anggaran dimana anggaran di kegiatan lain di alihkan ke kegiatan untuk penanganan covid 19. Anggaran yang diberikan pemerintah ini salah satunya digunakan untuk memberikan insentif ke petugas kesehatan karena telah melaksanakan tugasnya dalam mencegah dan menangani covid 19 secara langsung. Dalam melakukan wawancara dengan Sub. Kordinator Surveilans dan Imunisasi menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung dan penghambatnya yaitu :

“Faktor penghambat adalah pengetahuan masyarakat dan stigma masyarakat. Dimana stigma masyarakat pasien covid 19 ini harus di hindari. Hal ini yang harus dihindari. Penyebaran hoax tentang covid 19 yang masih tinggi sehingga masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Untuk faktor pendukung keterlibatan media-media sebagai penyebar informasi tentang edukasi covid 19 yang sebenarnya” (Wawancara dengan Informan Mappibaung, S.Kep pada Rabu, 22 Februari 2023)

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung dalam manajemen krisis ini yaitu media-media bekerja sama

dengan pemerintah dalam membagikan informasi yang tepat dan benar ke masyarakat agar masyarakat kembali percaya ke pemerintah daerah. Salah satu warga berpendapat mengenai berita covid ini dalam wawancaranya yaitu :

“covid ini sebenarnya tidak adaji kayaknya. semua orang yang sakit masa di bilang covid, orang yang tidak sakit awalnya setelah diswab positif tiba-tiba langsung sakit” (Wawancara dengan Informan Daeng Paneng pada Kamis, 23 Februari 2023)

Dari pernyataan warga diatas dimana angka covid yang tinggi di rumah sakit membuat masyarakat tidak percaya. Pasien yang datang bukan dengan gejala covid tetapi setelah melakukan pemeriksaan dinyatakan terkena covid. Sedangkan jika ditelaah dengan baik masyarakat tidak mau menerima edukasi covid ini sendiri, yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pandemi covid ini tidak ada.

C. Pembahasan

Manajemen krisis merupakan suatu bentuk tindakan untuk merespon dan menyelesaikan masalah terkait krisis yang muncul melalui kemungkinan strategi manajemen krisis. Yang menjelaskan manajemen krisis sebagai usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi krisis yang terjadi. Krisis memiliki dampak yang negatif yang dapat mengancam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kasali mendefinisikan krisis sebagai suatu kondisi tidak stabil yang dialami oleh sebuah perusahaan yang dilihat dari adanya perubahan perubahan signifikan yang mengarah pada keadaan terancam. Perubahan tersebut memiliki kemungkinan apakah sesuai dengan yang terjadi ataupun

tidak yang mana pada akhirnya akan melahirkan sebuah perubahan yang lebih baik.

Dari hasil wawancara di atas Brigade Siaga 115 di Kabupaten Jeneponto berperan dalam menangani manajemen krisis mengenai covid 19. Selain itu pemerintah daerah juga membuat regulasi yang baru serta membentuk Tim Gerak Cepat yang juga berperan dalam menangani kasus covid 19 di kabupaten jeneponto. Pemerintah daerah dalam manajemen krisis ini juga menggabungkan beberapa stakeholder pemerintah dalam menangani covid 19 yaitu TNI, POLRI, Kesbangpol, Satpol PP, BPBD dan Dinas Kesehatan agar terkiranya dapat menekan penyebarluasan covid 19 ini. Langkah kegiatan yang pemerintah daerah ambil dalam menangani manajemen krisis mengenai covid 19 ini dengan melakukan pemeriksaan kesetahan di pintu masuk perbatasan kabupaten jeneponto dan juga TGC bergerak cepat jika menemukan kasus covid 19 untuk selanjutnya dirujuk atau dipindahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Dalam melaksanakan tugasnya Brigade Siaga 115/Tim Gerak Cepat memiliki risiko yang tinggi sehingga cara melindungi dirinya dengan memaksimalkan safety dengan mempersiapkan alat pelindung diri yang akan digunakan. Dalam menjalankann tugasnya. Serta untuk memaksimalkan kinerja dari Tim Gerak Cepat ini pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat menanbah kapasitas sumber daya manusianya.

Tugas yang dilaksanakan oleh Tim Gerak Cepat ini dapat terlaksana karena adanya bantuan anggaran dari pemerintah baik itu melalui alokasi btt dan juga melaluin refocusing anggaran. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

pandemi covid ini menjadi faktor penghambat dalam manajemen krisis melalui Brigade Siaga 115 maupun Tim Gerak Cepat. Tingginya penyeberluasan berita hoax mengenai covid membuat masyarakat semakin kurang percaya ke pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan dengan edukasi melalui petugas kesehatan dan media-media untuk menyebarluaskan informasi yang benar adanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menangani Covid 19 di Kabupaten Jeneponto yang dilakukan melalui wawancara peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses Manajemen Krisis yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Brigade Siaga 115 di Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut :

1. Peramalan krisis (*forcasting*) . Pemerintah Kabupaten Jeneponto membuat Brigade Siaga 115 sebelum pandemi Covid-19 kemudian setelah pandemi Pemerintah Daerah membuat regulasi baru dan Tim Gerak Cepat (TGC) khusus penanganan covid-19 dan Brigade Siaga 115 masih melaksanakan tugasnya sesuai kegawatdaruratan.
2. Pencegahan krisis ini langkah paling efisien yang dilakukan sebelum krisis itu terjadi. Bahwa resiko yang terjadi dalam manajemen krisis ini yaitu penularan covid-19 ke Petugas Brigade Siaga 115 dan TGC untuk menghindari hal ini pemerintah menyiapkan alat pelindung diri, menyiapkan suplemen daya tahan tubuh dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan.
3. Intervensi krisis (*intervantion*). Langkah pengendalian pemerintah dalam Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade Siaga 115 Dalam Menghadapi Covid-19 Di Kabupaten Jeneponto dengan

melakukan upaya edukasi untuk isolasi mandiri dan menyediakan hotel wisata covid bagi pasien yang terkena covid-19 dan juga melakukan penjagaan dan pemeriksaan kesehatan di pintu perbatasan kabupaten Jeneponto yang melibatkan Tim Gerak Cepat, TNI, POLRI, BPBD dan Satpol PP.

4. Faktor penghambat dari manajemen krisis ini terletak di masyarakat yang kurang untuk menerima informasi seputar covid-19, abai terhadap protokol kesehatan dan tingginya penyebaran hoax seputar covid 19. Sedangkan untuk faktor pendukung berasal dari kontribusi pemerintah dalam memberikan anggaran yang dapat melancarkan manajemen krisis serta bantuan media-media dalam penyebaran berita covid yang benar.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian seorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna ataupun bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau lembaga serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran-saran sesuai dengan pengamatan skripsi ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu kedepannya lebih memaksimalkan fungsi dari suatu instansi/program pemerintah yang telah ada sebelum membuat regulasi atau program yang baru sehingga kinerja petugas dapat digunakan sebaik mungkin.

2. Bagi masyarakat kabupaten Jeneponto yaitu kedepannya untuk lebih waspada dalam memilih informasi palsu dan asli yang beredar di media sosial agar tidak menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Andry, c. B. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. *Journal of chemical information and modeling*, 2(1), 5–7.
- Azami, M. I., Saifuddin, A., Ardhi, G. P., & ... (2021). Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan Covid-19. Masyarakat (jp2m), 2(1), 41–46.
- Fika, W. S. (2011). Analisa Manajemen Krisis Pt. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Cabang Pontianak Dalam Peristiwa Tenggelamnya Kapal Di Alur Pelayaran Pelabuhan (vol. 16, issue 22). Universitas pembangunan nasional “veteran” yogyakarta.
- Indasari, F., & Anggriani, I. (2020). Krisis Komunikasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberitaan Penyebaran Covid-19 Melalui Udara). *Profesional: jurnal komunikasi dan administrasi publik*, 7(1), 1–11.
- Jalaluddin. (2020). Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. (1), 68–82.
- Mahriva, M. N. (2020). Corporate Communication Pt. Xl Axiata Tbk. Merespon Masa Krisis Pandemi Virus COVID-19. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(1), 137– 149
- Meri Safarwati, M. (2021). Manajemen Krisis Pt. Kereta Api Indonesia Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Masa Pandemi Covid 19.

- Nahar, L. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Menghadapi Pandemi COVID-19. ., 1(5), 553–566.
- Permata, B. C., & Mulyana, D. (2021). Manajemen Krisis Perusahaan di Masa Pandemi Covid19. *Prosiding Hubungan Masyarakat*, 468–472.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia. *Qalamuna: jurnal pendidikan, sosial, dan agama*, 12(01), 59–70.
- Ulfa, N., Suadnya, W., & Khusnia, H. N. (2019). Manajemen Krisis Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Pada Saat Gempa Bumi Lombok 2018 *Journal of media and communication science*, 2(2), 5–8.
- Vebrianti, S., & Hidayat, D. (2021). Manajemen Krisis Study From Home Dan Kebijakan Di Masa New Normal (1), 39–58.



Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



Wawancara Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi



Wawancara Tenaga Kesehatan



Wawancara dengan Warga



Wawancara dengan warga

Lampiran 2

UNSUR PENDUKUNG PENELITIAN

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 3319/05/C.4-VIII/XII/1444/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Jumadil awal 1444 H
07 December 2022 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2043/FSP/A.1-VIII/XII/1444 H/2022 M tanggal 2 Desember 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NUR WAHYUDA HIDAYAT
No. Stambuk : 10564 1103017
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Manajemen Krisis Pemerintah Daerah melalui Brigade 115 dalam Menangani Covid-19 di Kabupaten Jeneponto"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Desember 2022 s/d 12 Februari 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

12-22



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 13046/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Jeneponto
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3319/05/C.4-VIII/XII/1444/2022 tanggal 07 Desember 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR WAHYUDA HIDAYAT
Nomor Pokok : 105641103017
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH DAERAH MELALUI BRIGADE 115 DALAM MENANGANI COVID-19 DI KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 07 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311
web : dpmptsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/811/ITK/DPMPTSP/JP/XII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 743/XII/REK-IP/DPMPTSP/2022.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : NUR WAHYUDI HIDAYAT
Nomor Pokok : 105641103017
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA (S1)
Alamat Peneliti : PANAIKANG KEL.BONTORANNU KEC.BANGKALA
KAB.JENEPONTO
Lokasi Penelitian : DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan judul :

**MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH DAERAH MELALUI BRIGADE 115 DALAM MENANGANI COVID-19
DI KABUPATEN JENEPONTO**

Lamanya Penelitian : 2022-12-07 s/d 2023-01-07

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
15/12/2022 00:55:38
KEPALA DINAS,



HJ. MERYANI, SP. M. SI
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311
web : dpmtsp.jenepontokab.go.id

2. Arslp



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi





**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN**

Jl. Kesehatan No. 08 Bontosunggu Kel. Empoang Kec. Binamu Telp. (0419) 21044 Fax. (0419) 23022

Nomor : 800 / 20608 / DINKES / XII / 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Jeneponto, 20 desmber 2022

Makassar

Kepada
Yth. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah
Di -
Makassar-

Berdasarkan dengan surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 3319/05/C.4-VII/XII/1444/2022, perihal Izin Penelitian, tanggal 15 Desember 2022, dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : NUR WAHYUDA HIDAYAT
Nomor Pokok : 10564 1103017
Semester : -
Fakultas : Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melakukan penelitian di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :

"Manajemen Krisis Pemerintah Daerah Melalui Brigade 115 Dalam Menangani Covid-19 di Kabupaten Jeneponto".

Pada prinsipnya kami menyetujui penelitian diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah penelitian harus melapor kepada Instansi yang bersangkutan;
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang diberikan / izin semata mata diberikan untuk keperluan ilmiah;
3. Mentaati semua ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan satu berkas photo copy hasil penelitian tesis kepada : Bupati Jeneponto Cq. Kepada Dinas Kesehatan Daerah Kab. Jeneponto.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



M. SYUSANTY A. MANSYUR, SKM., M. Kes
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19750102 199903 2 007

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jeneponto di Bontosunggu sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan di Tempat;
4. Peringgal.

Nur Wahyuda Hidayat 105641103017 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.rumahjurnal.net

Internet Source

4%

2

id.123dok.com

Internet Source

2%

3

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

☐

Exclude bibliography

☐

Exclude matches

☐

< 2%

Nur Wahyuda Hidayat 105641103017 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%	25%	11%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upm.ac.id Internet Source	4%
2	etd.ummy.ac.id Internet Source	4%
3	ojs.uho.ac.id Internet Source	4%
4	journal.unismuh.ac.id Internet Source	3%
5	nanopdf.com Internet Source	3%
6	www.jcomm.unram.ac.id Internet Source	2%
7	M Asrul Aziz. "Optimalisasi Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Pada Polri", Jurnal Litbang Polri, 2023 Publication	2%
8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Nur Wahyuda Hidayat 105641103017 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

2%

2

Avelius Dominggus Sore, Yopinus Bobi.
"PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL BERBASIS
ANYAMAN LIDI DI DESA TAPANG SEMADAK
KABUPATEN SEKADAU", Jurnal Pendidikan
Ekonomi (JURKAMI), 2024

Publication

2%

3

jurnal.univpgri-palembang.ac.id

Internet Source

2%

4

muinarifah.blogspot.com

Internet Source

2%

5

journal.unhas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Nur Wahyuda Hidayat 105641103017 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10 %	10 %	2 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	4 %
2	www.lelemuku.com Internet Source	2 %
3	core.ac.uk Internet Source	1 %
4	Submitted to Myongji University Graduate School Student Paper	1 %
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
6	dpmddukcapil.baliprov.go.id Internet Source	1 %
7	media.neliti.com Internet Source	1 %

Exclude quotes ☒ On
Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☐ < 1%

Nur Wahyuda Hidayat 105641103017 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainkudus.ac.id	3%
Internet Source		
2	123dok.com	2%
Internet Source		

Exclude quotes ☒ On
Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☒ 51%

RIWAYAT HIDUP



Nur Wahyuda Hidayat, lahir di Jeneponto, pada tanggal 02 Agustus 1999, Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan lahir dari pasangan suami istri yaitu, Bapak Alm. H. Muh. Zuhri dan Ibu Hj. Saripa. Kini penulis beralamat di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD INPRES 185 PANAIKANG

Tahun 2004 dan lulus pada Tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 3 BANGKALA dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di SMA NEGERI 1 BANGKALA dan lulus pada tahun 2016 kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan selesai pada tahun 2025. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.